

29 Rumah di Pandeglang Porak Poranda Disapu Puting Beliu

PANDEGLANG (IM)- Sebanyak 29 rumah di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang hancur disapu puting beliu. Kerusakan berat mayoritas terjadi di bagian atap rumah hingga ke ruangan dapur milik warga.

Informasi yang diperoleh, kejadian mengerikan ini terjadi pada Rabu (3/2) sekira pukul 19.00 WIB. Saat peristiwa berlangsung, warga tak menyadari hembusan angin kencang akan datang dan langsung memporak-porandakan puluhan rumah di lokasi tersebut.

"Iyah, hancur kang kena puting beliu. Enggak ada yang tahu soalnya kejadiannya itu pas warga mau berangkat ke musala buat salat Isya," kata Andi Sutisna, warga setempat di lokasi kejadian, Pandeglang, Banten, Kamis (4/2).

Andi juga mengaku ketua RT di wilayah itu turut menjadi korban hembusan angin kencang puting beliu. Untungnya, kerusakan di rumahnya tidak terlalu berat dibandingkan warga di lingkungannya.

"Kalau rumah saya Alhamdulillah enggak terlalu. Yang parah itu ada rumah

warga di sini bagian dapur nya udah pada hancur, atapnya juga para ambruk," sebutnya.

Pantauan di lokasi, kondisi puluhan rumah warga di sana sudah porak poranda akibat disapu puting beliu. Beberapa warga pun masih terlihat bergotong royong untuk membersihkan puing-puing sisa reruntuhan.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Desa Sidamukti, Asep Saepudin turut membenarkan angin puting beliu telah merusak 29 rumah di dusunnya. Namun, ia memastikan tidak ada korban jiwa saat kejadian mengerikan itu terjadi.

"Di Desa Sidamukti ini ada dua RT yang kena dampak angin puting beliu. Alhamdulillah enggak ada korban jiwa, hanya ada warga saja yang sempat kena reruntuhan tapi itu cuma luka ringan," terangnya.

Selain memporak-porandakan puluhan rumah, hembusan angin puting beliu juga merusak sejumlah fasilitas lain di desa tersebut.

Tercatat, sebuah musala dan bangunan TK di sana juga ikut hancur tersapu puting beliu. ● pra



IDN/ANTARA

TANGGUL JEBOL AKIBAT BANJIR BANDANG

Warga melihat tanggul jebol akibat dihantam banjir bandang di Kampung Kamalake, Serang, Banten, Kamis (4/2). Ratusan rumah mengalami rusak berat dan ringan akibat banjir di delapan kecamatan wilayah Serang dan Cilegon setelah terjadi hujan deras sejak Selasa (2/2) sore hingga Rabu (3/2) pagi.

RENCANANYA SELESAI TAHUN 2023

Kemenag: Kapasitas Asrama Haji di Kota Tangerang Bisa Tiga Kloter

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah mengatakan ada dua opsi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan asrama haji ini yaitu lahan milik PT Angkasa Pura II dan lahan milik PT. Modernland Tbk yang sudah diserahkan kepada Pemkot Tangerang.

TANGERANG (IM)- Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Muhajirin Yanis mengatakan asrama haji di Kota Tangerang, Provinsi Banten yang akan dibangun memiliki kapasitas tiga kelompok terbang (kloter).

"Di Banten itu ada 25 kloter untuk haji. Estimasi keberangkatan sehari dua sampai tiga kloter. Jadi kemungkinan asrama haji ini mampu menampung tiga kloter," katanya

di Tangerang Kamis (4/2).

Dijelaskannya bahwa pembangunan asrama haji minimal mampu menampung satu kloter yakni 400 orang. Lalu disiapkan juga area alternatif untuk mengatasi terjadinya keterlambatan sebagai antisipasi.

Khusus untuk di Banten, kata dia, pembangunan asrama haji bisa lebih besar sebab jumlah kloter di Banten setiap tahun tergolong banyak. Terkait area lahan yang

dibutuhkan, ia mengatakan jika luas yang dibutuhkan mencapai 5 hektare namun pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Kota Tangerang terkait lokasi yang dipilih.

"Lahan masih kita tunggu dari Pemkot Tangerang dahulu. Sebab nanti baru bisa kita bahas lanjutan mengenai keterlambatan sebagai antisipasi."

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah mengatakan ada dua opsi lahan yang bisa dimanfaatkan yaitu lahan milik PT Angkasa Pura II dan lahan milik PT. Modernland Tbk yang sudah diserahkan kepada Pemkot Tangerang.

"Secepatnya kami akan berkoordinasi secara intens dengan Kemenag Provinsi, Banten, untuk menentukan lahan mana yang kiranya representatif untuk pembangunan

Asrama Haji," katanya.

Sebelumnya pada hari Rabu (3/2) Komisi VIII DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Tangerang membahas mengenai pembangunan asrama haji di Kota Tangerang.

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengatakan pembangunan asrama haji di Kota Tangerang, Banten segera dilaksanakan dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2023.

"Kita minta tahun ini dilakukan penentuan lahan dan tahun depan dilaksanakan pembangunan sehingga tahun 2023 bisa terealisasi dan digunakan masyarakat untuk aset asrama haji dan umroh," katanya.

Kemudian Komisi VIII DPR juga mendorong Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah untuk segera mengirim surat kepada kementerian terkait jika ada aset yang

terpakai dalam pembangunan asrama haji.

Setelah proses itu selesai maka Pemkot Tangerang bisa melakukan koordinasi dengan DPRD agar proses penyerahan lahan tersebut berjalan lancar. "Tahun ini kita targetkan urusan lahan selesai bersama dengan grand desain," demikian Selly Andriany Gantina.

Selain itu DPR RI juga akan menunggu surat tembusan dari Pemkot Tangerang yang disampaikan kepada Kemenag mengenai pembangunan ini. Agar nantinya DPR RI komisi VIII membuat Panitia Kerja (Panja) sehingga evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan.

"Kita akan sangat konsentrasi untuk merealisasikan pembangunan asrama haji ini. Apalagi selama ini warga Banten yang haji harus ke Pondok Gede. Jadi jika sudah ada maka akan terkonsentrasi dalam satu lokasi," katanya. ● pp

Pemkot Tangerang Minta Kampanye 3M Diseragamkan

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang meminta pemerintah pusat untuk melakukan penyeragaman terkait kampanye kesehatan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), khususnya tagline 3M yang kini telah menjadi 5M.

"Pada awal pandemi kampanye kesehatan adalah 3M, lalu berubah menjadi 4M dan kini ada usulan menjadi 5M. Namun, ada juga yang kampanye 4M. Kita ingin agar selama proses PPKM ini ada kesamaan kampanye yang dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah di Puspemkot Tangerang, Kamis (4/2).

Tagline 3M berupa ajakan kepada masyarakat untuk memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Kini tagline yang berkembang di masyarakat setelah hampir satu tahun adalah 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan.

Sedangkan 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pemerintah Kota Tangerang berharap Kementerian/Lembaga memberikan regulasi teknis mengenai kegiatan masyarakat yang dibatasi selama PPKM. Misalnya saja, untuk makan di acara

pernikahan diganti dari prasmanan menjadi menggunakan nasi kotak.

Meski Pemerintah Kota Tangerang telah membuat Peraturan Wali Kota, dengan adanya regulasi teknis yang diberikan akan menjadi pegangan bagi daerah dalam menjalankan aturan. "Harapannya adalah pemerintah pusat memberikan regulasi yang lebih teknis agar komunikatif dengan instansi vertikal yang dilakukan berjalan optimal demi menekan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Agus Henra mengatakan operasi aman bersama yang dilakukan Satpol PP di 13 kecamatan terus ditingkatkan. Sebanyak 300 personel dikerahkan dengan dibagi tiga bagian/shift.

Pengawasan dilakukan petugas bersama Kepolisian dan TNI dengan sasaran area publik yang rawan terjadi kerumunan. Petugas juga melakukan monitoring di ruko/perkantoran untuk memastikan aturan Work From Office (WFO) 25 persen dijalankan. "Kita juga menindak usaha yang melanggar aturan, seperti tempat game online hingga arena olahraga. Untuk tempat usaha makanan ada aturannya sampai pukul 8 malam. Jika sudah ada yang ditegur dan kembali melanggar akan ditindak tegas," katanya. ● pp

DLH Kota Tangerang Investigasi Limbah B3 yang Dibuang di Bogor

TANGERANG (IM)- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang langsung menerjunkan tim ke lokasi penemuan limbah bahan beracun berbahaya (B3) Alat Pelindung Diri (APD) di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Dadang Basuki mengatakan, saat ini tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sedang melakukan investigasi dari mana limbah Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19. "Kita sedang selidiki semuanya. Apakah dari sumber atau pihak ketiga yang melakukan pembuangan," kata Dadang, Kamis (4/2).

Jika ditemukan kesalahan dari sumber, kata Dadang, maka bisa dikenakan sanksi tegas. Dan, jika yang melakukan kesalahan dari pihak ketiga, maka yang berhak dari kementerian lingkungan hidup. "Kalau kesalahan dari pihak ketiga,

nanti sanksinya dari kementerian lingkungan hidup karena yang merekomendasi izinnya dari sana," pungkasnya.

Ketika ditanya soal sumber yang dimaksud, Dadang belum bisa memberikan kejelasan. "Temen-teman sedang diinvestigasi. Sabar dulu ya," jelasnya. Sebelumnya, puluhan karung yang berisikan limbah beracun ditemukan di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tumpukan karung tersebut ternyata bekas alat pelindung diri (APD) Covid-19. "Ada sekitar 55 karung, laporan masuk ke kami sekitar pukul 09.00 WIB tadi," ujar Kepala Desa Cigudeg, Andi Supriadi, Rabu, 3 Februari 2021.

Limbah beracun yang ditemukan merupakan alat pelindung diri (APD) seperti hazmat, jarum suntik, dan botol infus. Dan, limbah medis tersebut tertera alamat Kota Tangerang, Banten. ● pp

KPK Perlu Turun Tangan Soal Dugaan Penyerobotan Lahan Situ Kelapa Dua

TANGERANG (IM)- Penyusutan luas lahan Situ Kelapa Dua yang berlokasi di Jalan Danau Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang kini menjadi perhatian publik. Situ Kelapa Dua yang awalnya memiliki luas sekitar 36 hektare kini dikabarkan mengalami penyusutan luas hingga 16 hektare. Pengamat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun tangan untuk bisa menyikapi dugaan penyerobotan lahan milik negara ini.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan, dari 36 hektare luas lahan Situ Kelapa Dua yang saat ini dikabarkan tinggal 16 hektare berarti adanya dugaan penyerobotan negara lahan seluas 20 hektare. Menurutnya, permasalahan ini harus diurus tuntas, siapa saja pihak yang berani bermain dan melanggar hukum atas adanya penyusutan lahan Situ Kelapa Dua.

"Saya pikir KPK memang harus turun tangan. Bisa dibayangkan, ini lahan 20 hektare, bukan luas yang sedikit," ungkap Adib, Kamis (4/2).

Ia menjelaskan, langkah tersebut perlu dilakukan agar tindakan melanggar hukum tidak terjadi lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI perlu turun tangan karena masih banyak kejadian dugaan penyerobotan lahan milik negara yang seharusnya menjadi aset yang harus dilindungi negara.

"Apalagi, saat ini KPK RI sedang memantau fasilitas umum dan sosial di wilayah Tangerang Raya yang masih berantakan," pungkasnya.

Adib melanjutkan, hal ini menunjukkan sebuah kelemahan dalam tata kelola aset negara. Berdasarkan aturan, pengelolaan situ merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi ketika pemerintah daerah yang terdekat tidak memiliki kewenangan cenderung tidak melakukan monitoring. "Saya kira, situ dan danau yang merupakan aset negara yang lokasinya dekat dengan pemerintah daerah, kewenangan pengelolannya perlu diberikan saja kepada pemerintah daerah," ujarnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMS-DA) Kabupaten Tangerang,

Slamet Budhi Mulyanto mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima kini luas Situ Kelapa Dua hanya tinggal sekitar 16 hektare dari luas sebelumnya yang mencapai 36 hektare.

Pada 2015, lanjutnya, Pemkab Tangerang telah mengusulkan pelimpahan kewenangan pengelolaan Situ Kelapa Dua dari pemerintah pusat ke Pemkab Tangerang. Namun, hingga saat ini belum ada pelimpahan kewenangan pengelolaan situ tersebut.

"Di Kabupaten Tangerang ada 26 situ dan semuanya menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujar Budhi.

Hingga saat ini, kata Budhi, Pemkab Tangerang kebingungan atas kondisi yang tengah terjadi, padahal jika sudah diberikan kewenangan kepada Pemkab Tangerang, pihaknya akan mengukur batas situ dan menyertifikatkannya sebagai upaya pengamanan kekayaan negara.

"Kalau tidak dilakukan pengamanan, mungkin setiap tahun luas Situ Kelapa Dua akan semakin berkurang akibat aktivitas pihak swasta," ungkapnya. ● pp



IDN/ANTARA

PERMINTAAN DODOL KERANJANG MENURUN

Pekerja menata dodol keranjang di industri rumahan di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (4/2). Menurut pengelola industri dodol keranjang, permintaan dodol keranjang khas Imlek yang dijual Rp 21.000 hingga Rp24 ribu per kilogram menurun hingga 20 persen dari tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19.

RSU Pakulonan Ditargetkan Maret Sudah Bisa Tangani Pasien Covid-19

TANGSEL (IM)- Rumah Sakit Umum (RSU) Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, yang akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19 belum bisa beroperasi pada Februari ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni menjelaskan, rumah sakit baru tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada awal Maret 2021.

Saat ini, pihaknya masih masih mengurus proses perizinan sekaligus mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. "Target awal Maret beroperasi. Kami sudah hitung dari hari ini, kami ini hari keberapa berproses. Di perizinan kan sudah berjalan tuh, kami punya time table," ujar Deden dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (4/2).

Menurut Deden, target pengoperasian RSU Pakulonan sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19 juga menyesuaikan dengan tahapan persiapan yang saat ini sudah berjalan 70 persen. "Ya sudah lebih dari setengah jalan. Lebih dari 50 persen. Sudah 60-70 persen," ungkapnya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Imbar Umar Gazali sebelumnya

menjelaskan, gedung rumah sakit tersebut memang sudah selesai dibangun. Namun, perlengkapan atau peralatan medis di dalamnya sampai saat ini belum tersedia.

"Untuk bangunannya sudah selesai dibangun, kalau alat-alatnya masih belum. Ada yang masih proses pemasangan, ada yang akan diambil dari puskesmas," ujar Imbar pada 27 Januari lalu.

Menurut Imbar, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus mengeluarkan peraturan wali kota (perwal) terkait pengoperasian rumah sakit baru tersebut. "Saat ini sedang penyusunan perwal. Setelah itu dilaporkan ke tingkat provinsi dan akan ditinjau. Perkiraan beres (bisa beroperasi) pertengahan Februari," ungkapnya saat itu.

Penggunaan RSU Pakulonan untuk penanganan Covid-19 sudah diwacanakan sejak Desember 2020. Kala itu, Wakil Wali Kota Tangsel, Bennyamin Darnie mengatakan, rumah sakit umum baru tersebut sudah selesai dibangun dan siap dioperasikan mulai 4 Januari 2021. "Rumah Sakit Pakulonan konstruksi fisiknya sudah siap, sekarang sudah tahap pembersihan. Kemudian juga listrik sudah siap, lift sudah siap," ujar Bennyamin pada 30 Desember 2020. ● pp



IDN/ANTARA

BUDI DAYA TANAMAN BONSAI

Petani merawat tanaman bonsai ulmus di Desa Sukalaksana, Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (4/2). Menurut petani, budi daya bonsai di kawasan pertanian tersebut menjadi salah satu cara guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengedukasi masyarakat setempat terhadap tanaman hias bonsai yang bisa ditanam secara mandiri di rumah.